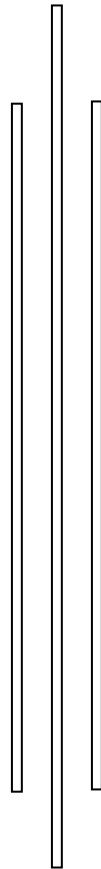




PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR



LAPORAN KEUANGAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN ANGGARAN 2013
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2013

DAFTAR ISI

Pernyataan Tanggung Jawab.....	1
Laporan Realisasi Anggaran.....	2
Neraca	3
Catatan Atas Laporan Keuangan	4
- BAB I Pendahuluan	4
- BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Program Pencapaian Target Kinerja	8
- BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan.....	9
- BAB IV Kebijakan Akuntansi	12
- BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan	16
Lampiran – lampiran	28

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran; Neraca; dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2013 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Blitar, 3 Februari 2014

Kepala SKPD Badan PPKB Kabupaten Blitar

Drs. WAHID ROSIDI, MM
NIP. 19600721 198503 1 011

SKPD.....

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

(diganti Print out Simda)

Terdiri dari :

- 1) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013;
- 2) Laporan Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan dengan pilihan program dan kegiatan dikosongkan (untuk laporan belanja langsung dan tidak langsung) per 31 Desember 2013;
- 3) Laporan Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan (per 31 Desember 2013)

SKPD

NERACA

PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012

(diganti Print out Simda)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BLITAR

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan tahun 2013 disusun secara lengkap dengan maksud sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2013 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja.

Realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar **Rp 0,00** mencapai **0 %** dari anggarannya.

Realisasi belanja dan transfer pada Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar **Rp.10.446.302.387,00** atau mencapai **98,22%** dari anggarannya.

b. Laporan Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2013 mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan.

Jumlah aset per 31 Desember 2013 adalah sebesar **Rp.10.160.126.491,64** yang terdiri dari aset lancar sebesar **Rp.1.660.491.994,00** investasi jangka panjang sebesar **Rp 0,00**, aset tetap sebesar **Rp.8.499.634.497,64**, dana cadangan **Rp.0,00**, dan aset lainnya sebesar **Rp.0,00**.

Jumlah kewajiban per 31 Desember 2013 adalah sebesar **Rp 0,00**, yang terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar **Rp 0,00**, dan kewajiban jangka panjang sebesar **Rp 0,00**,

Jumlah ekuitas dana per 31 Desember 2013 adalah sebesar **Rp.10.160.126.491,64** yang terdiri dari ekuitas dana lancar sebesar **Rp.1.660.491.994,00**, ekuitas dana investasi sebesar **Rp.8.499.634.497,64**, dan ekuitas dana cadangan sebesar **Rp.0,00**.

c. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

Dalam penyajian neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005 Nomor 3/E);
13. Peraturan Bupati Blitar Nomor 42 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2010 Nomor 42/E);
14. Peraturan Bupati Blitar Nomor 28 Tahun 2013 tentang Penambahan Lampiran Peraturan Bupati Blitar Nomor 42 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2010 Nomor 28/E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2013 (Lembaran daerah Kabupaten Blitar Tahun 2013 Nomor 1/A);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2013 Nomor 3/A);
17. Peraturan Bupati Blitar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2013 Nomor 1/A);
18. Peraturan Bupati Blitar Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2013 Nomor 33/A);

1.3. Unsur Laporan Keuangan

Laporan Keuangan SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar Tahun 2013 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013, yang terdiri atas:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Neraca; dan
- c. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.4. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain:

- a. Menyajikan informasi tentang pencapaian target yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
- c. Menyajikan informasi tentang dasar laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- d. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.
- e. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PROGRAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1 Ekonomi Makro

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat dipengaruhi oleh besaran-besaran makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan pemerintah daerah, dalam hal ini di SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar, mencakup aspek kebijakan di bidang pengeluaran, Pemerintah Daerah melakukan pengeluaran antara lain untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, stimulasi pertumbuhan ekonomi di sektor riil dan pengeluaran lainnya yang mengarah pada efisiensi dan efektivitas.

2.3 Program Pencapaian Target Kinerja

Untuk pencapaian target kinerja tahun anggaran 2013, SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar mempunyai 16 program dalam urusan pelayanan umum, dimana dari masing-masing program tersebut terdapat beberapa kegiatan yang mengikutinya.

Program-program APBD SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar yang dilaksanakan pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;
- c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ;
- d. Program Pelayanan Kontrasepsi ;
- e. Program Kesehatan Reproduksi Remaja ;
- f. Program Keluarga Berencana ;
- g. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan ;
- h. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak ;
- i. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan ;
- j. Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan ;
- k. Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak.
- l. Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri ;
- m. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2013 secara keseluruhan sebesar **Rp 10.635.959.800,00** yang terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp.)
1	Belanja Operasi	8.545.135.300,00
2	Belanja Modal	2.090.824.500,00
	Surplus/(Defisit)	(10.635.959.800,00)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperoleh SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar berdasarkan kepada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.10.635.959.800,00 terdiri dari Anggaran Belanja sebesar Rp.10.635.959.800,00.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar selama tahun 2013 dapat dirinci sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%
1	2	3	4	5=(4/3x100)
1	Belanja	10.635.959.800,00	10.446.302.387,00	98,22
	- <i>Belanja Operasi</i>	8.545.135.300,00	8.477.854.387,00	99,21
	- <i>Belanja Modal</i>	2.090.824.500,00	1.968.448.000,00	94,15
	Surplus/(Defisit)	(10.635.959.800,00)	(10.446.302.387,00)	98,22

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

3.1.1. Pendapatan Daerah

Realisasi pencapaian pendapatan daerah mencapai tahun 2013 Rp. 0,00.

3.1.2. Belanja Daerah

Realisasi belanja sampai akhir tahun 2013 sebesar Rp. **10.446.302.387,00** atau **98,22** persen, dengan demikian jumlah anggaran belanja yang tidak dapat diserap sebesar

Rp.189.657.413,00 atau **1,78** persen yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN 1 TAHUN	REALISASI	%
	1	2	3	4
1	Belanja Tidak Langsung	6.523.876.600,00	6.502.318.016,00	99,67
2	Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran	488.643.150,00	474.003.506,00	97,00
3	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.969.524.500,00	1.840.868.780,00	93,47
4	Validasi dan Verifikasi BMD	7.500.000,00	6.600.000,00	88,00
5	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	13.850.000,00	12.250.000,00	88,45
6	Pelayanan KB Medis Kontrasepsi	14.680.000,00	14.100.000,00	96,05
7	Advokasi KIE tentang Kesehatan Reproduksi	20.350.000,00	20.350.000,00	100
8	Pelatihan PIK KRR bagi Penyuluh KB Kabupaten Blitar	21.607.000,00	18.307.000,00	84,73
9	Pelayanan KIE	509.037.500,00	506.262.500,00	99,45
10	Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	20.200.000,00	14.785.000,00	73,19
11	Fasilitasi Forum Anak Menuju Kabupaten Blitar Layak Anak	91.062.500,00	90.851.535,00	99,77
12	Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)	41.402.500,00	41.402.500,00	100
13	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	91.250.050,00	91.115.050,00	99,85
14	Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu (GSI)	34.450.000,00	25.590.000,00	74,28
15	Kegiatan Pembinaan organisasi perempuan	500.000.000,00	500.000.000,00	100
16	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan	35.445.000,00	35.345.000,00	99,72
17	Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	49.536.000,00	48.683.500,00	98,28
18	Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	150.000.000,00	149.925.000,00	99,95

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN 1 TAHUN	REALISASI	%
19	Fasilitasi Forum Pelayanan KRR bagi kelompok Remaja dan kelompok Sebaya	53.545.000,00	53.545.000,00	100
	Total	10.635.959.800,00	10.446.302.387,00	98,22

3.2 Hambatan dan Kendala

Secara umum berapa hambatan atau kendala yang ada dalam pencapaian target realisasi belanja yang tidak optimal antara lain :

- a. Belanja ada yang tidak bisa 100% karena memang belanja rutin sesuai dengan kebutuhan / pengeluaran riil;
- b. Dengan adanya sisa lebih pada rekening listrik, karena menghemat pengeluaran listrik;
- c. Untuk memenuhi target pembangunan gedung penyuluh KB ada beberapa kecamatan yang belum mempunyai lahan.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban, entitas pelaporan dari laporan keuangan daerah ini adalah Pemerintah Kabupaten Blitar. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam laporan ini, entitas akuntansinya adalah Satuan-satuan Kerja Perangkat Daerah.

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah, yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

1. Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

a. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

b. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

c. Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Daerah dan dilaksanakan berdasarkan azas bruto. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening Kas Daerah.

d. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini, tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Pengukuran/penilaian Aset adalah sebagai berikut.

1) **Persediaan**

Persediaan disajikan sebesar:

- a) **Biaya perolehan** apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.
- b) **Biaya standar** apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.
- c) **Nilai wajar**, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

2) **Investasi**

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, investasi jangka panjang baik permanen maupun nonpermanen dicatat sebesar biaya perolehan. Untuk surat berharga tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya, yaitu sebesar harga pasar. Sedangkan Investasi jangka pendek non saham dicatat sebesar nilai nominalnya.

3) **Tanah**

Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

4) **Gedung dan Bangunan**

Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, serta jasa konsultan.

5) **Peralatan dan Mesin**

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap

pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut.

6) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

7) Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

8) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia; biaya bahan; pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi; penyewaan sarana dan peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
- b) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi; Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
- c) Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi:

- Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

e. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar saham. Arus ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

f. Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan.

4.3 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Blitar telah menyusun dan menetapkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 42 tahun 2010 tanggal 31 Desember 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 28 tahun 2013 tanggal 18 Oktober 2012 tentang Penambahan Lampiran atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 42 tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar.

Terkait dengan Peraturan Bupati tersebut maka dalam penyusunan Laporan Keuangan tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Blitar sudah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Bupati Blitar tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar, namun ada beberapa hal yang perlu dijelaskan antara lain:

a. Pengakuan

Pengakuan aset tetap sesuai nilai perolehannya, pada akhir periode akuntansi persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Kewajiban sesuai dengan kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

b. Kapitalisasi

Pemerintah Kabupaten Blitar telah menetapkan Batasan Minimal Kapitalisasi aset dalam penyusunan Laporan Keuangan tahun 2013.

c. Penyusutan

Pemerintah Kabupaten Blitar belum menerapkan penyusutan aset tetap dalam penyusunan Laporan Keuangan tahun 2013, dikarenakan masih dalam proses pelaksanaan inventarisasi aset.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

1. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

		31 Desember 2013	31 Desember 2012
		(Rp)	(Rp)
a. Aset		10.160.126.491,64	8.099.880.893,64
	Saldo Aset SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar per 31 Desember 2013 sebesar Rp 10.160.126.491,64 dengan rincian sebagai berikut.		

No	Uraian	Tahun 2013 (Rp)	Tahun 2012 (Rp)
(1)	Aset Lancar	1.660.491.994,00	1.568.694.396,00
(2)	Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
(3)	Aset Tetap	8.499.634.497,64	6.531.186.497,64
(4)	Dana Cadangan	0,00	0,00
(5)	Aset Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Aset		10.160.126.491,64	8.099.880.893,64

		31 Desember 2013	31 Desember 2012
		(Rp)	(Rp)
1) Aset Lancar		1.660.491.994,00	1.568.694.396,00
	Saldo Aset Lancar SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar per 31 Desember 2013 sebesar 0,00,		

No	Uraian	Tahun 2013 (Rp)	Tahun 2012 (Rp)
(a)	Kas	0,00	0,00
(b)	Piutang Retribusi	0,00	0,00
(c)	Piutang lain-lain	0,00	0,00
(d)	Persediaan	1.660.491.994,00	1.568.694.396,00
Jumlah		1.660.491.994,00	1.568.694.396,00

	<u>31 Desember 2013</u> (Rp)	<u>31 Desember 2012</u> (Rp)
(a) Kas	0,00	0,00

Saldo Kas SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar per 31 Desember 2013 sebesar Rp0,00 terdiri atas:

No	Uraian	Tahun 2013 (Rp.)	Tahun 2012 (Rp.)
(1)	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
(2)	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00

	<u>31 Desember 2013</u> (Rp)	<u>31 Desember 2012</u> (Rp)
(b) Piutang Retribusi	0,00	0,00

Saldo Piutang Retribusi SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar per tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp0,00.

	<u>31 Desember 2013</u> (Rp)	<u>31 Desember 2012</u> (Rp)
(c) Piutang lain-lain	0,00	0,00

Saldo piutang lain-lain SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar per tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp0,00.

	<u>31 Desember 2013</u> (Rp)	<u>31 Desember 2012</u> (Rp)
(d) Persediaan	1.660.491.994,00	1.568.694.396,00

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang masih berada di SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar. yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Saldo persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik per 31 Desember 2013 sebesar Rp1.660.491.994,00, dengan rincian sebagai berikut.

NO	URAIAN	NILAI (Rp.)
(1)	Alat Tulis Kantor (ATK)	155.000,00
(4)	Obat-obatan	511.899.078,00
(7)	Materai	99.000,00
(8)	Amplop	80.000,00
(13)	Stiker	27.900,00
(14)	Blangko, Map dan kertas kop	43.750,00
(16)	Alat kesehatan	9.000.000,00
(18)	Alat Kontrasepsi	1.139.187.266,00
	Jumlah	1.660.491.994,00

	<u>31 Desember 2013</u> (Rp)	<u>31 Desember 2012</u> (Rp)
2) Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00

Saldo Investasi jangka Panjang SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar per 31 Desember 2013 sebesar Rp0,00.

	<u>31 Desember 2013</u> (Rp)	<u>31 Desember 2012</u> (Rp)
3) Aset Tetap	8.499.634.497,64	6.531.186.497,00

Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar per 31 Desember 2012 sebesar **Rp6.531.186.497,64** dan per 31 Desember 2013 sebesar **Rp 8.499.634.497,64** dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2013 (Rp)	Tahun 2012 (Rp)
(a)	Tanah	0,00	0,00
(b)	Peralatan dan Mesin	5.794.430.948,00	4.276.618.948,00
(c)	Gedung dan Bangunan	2.690.213.299,64	2.239.577.299,64
(d)	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	14.990.250,00	14.990.250,00
(e)	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
(f)	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Jumlah Aset Tetap		8.499.634.497,64	6.531.186.497,64

Sedangkan mutasi penambahan dalam Tahun Anggaran 2013 sebesar **Rp.1.968.448.000,00** diperoleh dari jumlah total aset tahun 2013 yang dikurangi dengan jumlah total aset tahun 2012 (**Rp 8.499.634.497,64- Rp 6.531.186.497,64**) dapat dijelaskan sebagai berikut.

	<u>31 Desember 2013</u> (Rp)	<u>31 Desember 2012</u> (Rp)
(a) Tanah	0,00	0,00

Saldo Tanah SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar per 31 Desember 2013 sebesar Rp0,00.

	<u>31 Desember 2013</u> (Rp)	<u>31 Desember 2012</u> (Rp)
(b) Peralatan dan Mesin	4.276.618.948,00	3.826.331.548,00

Saldo peralatan dan mesin SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar per 31 Desember 2013 sebesar **Rp5.794.430.948,00** dengan perincian sebagai berikut.

Saldo awal	
Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon	Rp. 480.000.000,00
Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	Rp. 1.572.250.000,00
Perlengkapan Kantor Filling Kabinet	Rp. 4.000.000,00
Billboard/Papan Nama	Rp. 38.500.000,00
Air Conditioner (AC)	Rp. 5.280.000,00
Komputer PC	Rp. 108.121.450,00
Komputer Laptop	Rp. 305.515.000,00
Printer	Rp. 19.084.644,00
Modem	Rp. 2.449.744,00
Meja Kerja	Rp. 7.287.662,00
Kursi kerja	Rp. 800.000,00
Tempat tidur	Rp. 47.020.200,00
Kompor gas	Rp. 490.000,00
Lemari makan	Rp. 15.450.000,00
Dispenser	Rp. 525.000,00
Kulkas	Rp. 2.450.000,00
Piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau	Rp. 20.568.800,00
Kamera	Rp. 13.900.000,00
Handycam	Rp. 4.500.000,00
Pengeras Suara	Rp. 177.781.081,00
Alat-alat kedokteran umum	Rp. 17.500.000,00
Alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan	Rp. 933.536.467,00
Alat-alat Kedokteran Medis dan Non medis	Rp. 499.608.900,00
Jumlah	Rp. 4.276.618.948,00
Penambahan	
Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon	Rp. 269.240.000,00
Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Bus	Rp. 738.920.000,00
Peralatan Kantor Papan Visual Elektronik/OHP/LCD	Rp. 15.070.000,00
Perlengkapan kantor Billboard/Papan Nama	Rp. 179.025.000,00
Komputer PC	Rp. 106.915.000,00
Komputer laptop	Rp. 35.535.000,00
Printer	Rp. 26.225.000,00
Alat-alat Kedokteran Medis dan Non medis	Rp. 146.882.000,00
Jumlah	Rp. 1.517.812.000,00
Saldo akhir	
Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon	Rp. 749.240.000,00
Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Bus	Rp. 738.920.000,00
Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	Rp. 1.572.250.000,00
Peralatan Kantor Papan Visual Elektronik/OHP/LCD	Rp. 15.070.000,00
Perlengkapan Kantor Filling Kabinet	Rp. 4.000.000,00
Perlengkapan Kantor Billboard/Papan Nama	Rp. 217.525.000,00
Air Conditioner (AC)	Rp. 5.280.000,00
Komputer PC	Rp. 215.036.449,85
Komputer Laptop	Rp. 341.050.000,00
Printer	Rp. 45.309.644,86
Modem	Rp. 2.449.744,44
Meja Kerja	Rp. 7.287.661,86
Kursi kerja	Rp. 800.000,00
Tempat tidur	Rp. 47.020.200,00
Kompor gas	Rp. 490.000,00
Lemari makan	Rp. 15.450.000,00
Dispenser	Rp. 525.000,00
Kulkas	Rp. 2.450.000,00

Piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau	Rp.	20.568.800,00
Kamera	Rp.	13.900.000,00
Handycam	Rp.	4.500.000,00
Pengeras Suara	Rp.	177.781.081,00
Alat-alat kedokteran umum	Rp.	17.500.000,00
Alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan	Rp.	933.536.467,00
Alat-alat Kedokteran Medis dan Non medis	Rp.	646.490.900,00
Jumlah	Rp	5.794.430.948,00

➤ Penambahan Peralatan dan Mesin tahun 2013 sebesar **Rp1.520.774.948,00** berasal dari:

- ❖ Belanja Modal Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon sebesar Rp 269.240.000,00;
- ❖ Belanja Modal Alat-alat Darat Bermotor Bus sebesar Rp.738.920.000,00;
- ❖ Belanja Modal Peralatan Kantor Papan Visual Elektronik/OHP/LCD sebesar Rp.15.070.000,00;
- ❖ Belanja Modal Perlengkapan Kantor Billboard/Papan Nama sebesar Rp.179.025.000,00;
- ❖ Belanja Modal Komputer PC sebesar Rp. 106.915.000,00;
- ❖ Belanja Modal Komputer Laptop sebesar Rp. 35.535.000,00;
- ❖ Belanja Modal Printer sebesar Rp. 26.225.000,00;
- ❖ Belanja Modal Alat-alat Darat Kedokteran Medis dan Non Medis sebesar Rp.146.882.000,00;

	<u>31 Desember 2013</u> (Rp)	<u>31 Desember 2012</u> (Rp)
(c) Gedung dan Bangunan	2.690.213.299,64	2.239.577.299,64

Saldo gedung dan bangunan SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar per 31 Desember 2013 sebesar Rp**2.690.213.299,64** dengan perincian sebagai berikut.

Saldo awal	
Gedung Kantor	Rp. 1.932.081.098,64
Bangunan Gudang	Rp. 307.496.202,00
Jumlah	Rp. 2.239.577.299,64
Penambahan	
Gedung Kantor	Rp. 450.636.000,00
Jumlah	Rp. 450.636.000,00
Saldo akhir	
Gedung Kantor	Rp. 2.382.717.098,64
Bangunan Gudang	Rp. 307.496.202,00
Jumlah	Rp 2.690.213.299,64

➤ Penambahan Gedung dan Bangunan tahun 2013 sebesar **Rp450.636.000,00** berasal dari:

- ❖ Belanja Modal Gedung Kantor sebesar Rp450.636.000,00;

	<u>31 Desember 2013</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2012</u> <u>(Rp)</u>
(d) Jalan, Jaringan dan Instalasi	14.990.250,00	14.990.250,00

Saldo jalan, jaringan dan instalasi SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar per 31 Desember 2013 sebesar **Rp14.990.250,00** dengan perincian sebagai berikut.

Saldo awal			
Instalasi Listrik		Rp.	14.990.250,00
	Jumlah	Rp	14.990.250,00
Penambahan			
Instalasi Listrik		Rp.	0,00
	Jumlah	Rp.	0,00
Saldo akhir			
Instalasi Listrik		Rp.	14.990.250,00
	Jumlah	Rp	14.990.250,00

➤ Penambahan Jalan, Jaringan dan Instalasi tahun 2013 sebesar **Rp 0,00**

	<u>31 Desember 2013</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2012</u> <u>(Rp)</u>
(e) Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00

Saldo Aset Tetap Lainnya SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar per 31 Desember 2013 sebesar Rp0,00.

	<u>31 Desember 2013</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2012</u> <u>(Rp)</u>
(f) Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00

Saldo Kontruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2013 sebesar Rp0,00.

	<u>31 Desember 2013</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2012</u> <u>(Rp)</u>
4) Dana Cadangan	0,00	0,00

Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2013 sebesar Rp0,00

	<u>31 Desember 2013</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2012</u> <u>(Rp)</u>
5) Aset Lainnya	0,00	0,00

Komposisi dan nilai saldo Aset Lainnya SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar per 31 Desember 2012 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2013 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2013 (Rp)	Tahun 2010 (Rp)
(a)	Aset Tak berwujud	0,00	0,00
(b)	Aset Lain-lain	0,00	0,00
Jumlah Aset		0,00	0,00

Sedangkan mutasi penambahan dalam Tahun Anggaran 2013 sebesar 0,00 diperoleh dari jumlah total aset tahun 2013 yang dikurangi dengan jumlah total aset tahun 2012 (Rp0,00-Rp0,00) dapat dijelaskan sebagai berikut.

	<u>31 Desember 2013</u> (Rp)	<u>31 Desember 2012</u> (Rp)
(a) Aset Tak Berwujud	0,00	0,00

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2013 sebesar Rp0,00

	<u>31 Desember 2013</u> (Rp)	<u>31 Desember 2012</u> (Rp)
(b) Aset Lain-lain	0,00	0,00

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2013 sebesar Rp0,00,

	<u>31 Desember 2013</u> (Rp)	<u>31 Desember 2012</u> (Rp)
b. Kewajiban	0,00	0,00

Saldo Kewajiban SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp0,00.

	<u>31 Desember 2013</u> (Rp)	<u>31 Desember 2012</u> (Rp)
1) Kewajiban Jangka Pendek	0,00	0,00

Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun. Kewajiban Jangka Pendek per tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp0,00 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp0,00. Jumlah utang jangka pendek tersebut merupakan utang perhitungan pihak ketiga (PFK) dan utang jangka pendek lainnya.

	<u>31 Desember 2013</u> (Rp)	<u>31 Desember 2012</u> (Rp)
2) Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00

Saldo kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2013 sebesar Rp0,00.

	<u>31 Desember 2013</u> (Rp)	<u>31 Desember 2012</u> (Rp)
c. Ekuitas Dana	0,00	0,00

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar. meliputi Ekuitas Dana Lancar

(EDL) dan Ekuitas Dana Investasi (EDI). Ekuitas Dana per 31 Desember 2013 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)
1) Ekuitas Dana Lancar	1.660.491.994,00	1.568.694.396,00

Saldo akun ini merupakan jumlah cadangan untuk persediaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 sebesar **Rp1.660.491.994,00** dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Nilai (Rp)
(a)	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0,00
(b)	Cadangan Untuk Piutang	0,00
(c)	Cadangan Untuk Persediaan	1.660.491.994,00
(d)	Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang	0,00
(e)	Pendapatan yang Ditangguhkan	0,00
Jumlah Ekuitas Dana Lancar		1.660.491.994,00

	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)
2) Ekuitas Dana Investasi	8.499.634.497,64	6.531.186.497,64

Saldo akun ini merupakan kekayaan SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar yang berasal dari selisih Investasi Jangka Panjang ditambah Aset Tetap dan Aset Lainnya dikurangi dengan Kewajiban Jangka Panjang, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 sebesar **8.499.634.497,64** sebagai berikut.

No	Uraian	Nilai (Rp)
(a)	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	0,00
(b)	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	8.499.634.497,64
(c)	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (Tidak Termasuk Dana Cadangan)	0,00
(d)	Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	0,00
Jumlah Ekuitas Dana Investasi		8.499.634.497,64

	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)
3) Ekuitas Dana Cadangan	0,00	0,00

Saldo akun ini merupakan kekayaan SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar yang dicadangkan, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp 0,00.

2. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)
a. Pendapatan	0,00	0,00

Pendapatan meliputi semua penerimaan SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan Kas Daerah. Pendapatan SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar Anggaran dan realisasi dalam Tahun Anggaran 2013 serta realisasi Tahun Anggaran 2012, adalah Rp.0,00 sebagai berikut.

No	Pendapatan Daerah	Anggaran 2013 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2013	2012
(1)	Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0,00
	- Pajak			
	- Retribusi ...			
(2)	Lain-lain Pendapatan yang Sah	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00

	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)
b. Belanja	10.635.959.800,00	9.403.031.355,00

Belanja meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga. Dalam tahun 2013 SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar tersebut merupakan pengguna anggaran.

Anggaran dan realisasi belanja daerah tahun 2013 sebagai berikut.

	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)
1) Belanja Operasi	8.545.135.300,00	8.291.268.205,00

Belanja Operasi SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dengan realisasi tahun 2013 Rp **8.477.854.387,00** dengan rincian sebagai berikut.

No	Belanja Operasi	Anggaran 2013 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2013	2012
(a)	Belanja Pegawai	6.626.061.600,00	6.603.453.016,00	7.154.404.164,00
(b)	Belanja Barang dan Jasa	1.919.073.700,00	1.874.401.371,00	1.136.864.041,00
Jumlah		8.545.135.300,00	8.477.854.387,00	8.291.268.205,00

Selanjutnya Belanja Operasi SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar realisasi tahun 2013 dijelaskan dengan rincian dalam tabel sebagai berikut:

No	Belanja Operasi	Anggaran 2013 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2013	2012
	Belanja Tidak Langsung			
	Belanja Pegawai	6.523.876.600,00	6.502.318.016,00	6.769.644.914,00
	Gaji dan Tunjangan	6.301.276.600,00	6.298.883.016,00	6.553.694.914,00
	Tambahan Penghasilan PNS	222.600.000,00	203.435.000,00	215.950.000,00
1.	Jumlah Belanja Tak Langsung (1)	6.523.876.600,00	6.502.318.016,00	6.769.644.914,00
	Belanja Langsung			
	Belanja Pegawai	102.185.000,00	101.135.000,00	421.009.250,00
	Honorarium PNS	37.410.000,00	36.360.000,00	137.604.250,00
	Honorarium Non PNS	64.775.000,00	64.775.000,00	247.155.000,00
	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	0,00	0,00	36.250.000,00
	Belanja Barang/Jasa	1.919.073.700,00	1.874.401.371,00	1.100.614.041,00
	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	57.129.200,00	56.494.200,00	75.645.225,00
	Belanja Bahan/Material	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00
	Belanja Jasa Kantor	458.325.000,00	443.019.821,00	131.943.069,00
	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	51.200.000,00	43.978.280,00	37.792.704,00
	Belanja Cetak dan Penggandaan	177.294.500,00	175.669.050,00	119.904.950,00
	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang /Parkir	7.000.000,00	7.000.000,00	12.000.000,00
	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	49.262.000,00	48.932.000,00	7.785.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman	313.322.500,00	312.789.500,00	190.386.000,00
	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	0,00	24.630.000,00

	Belanja Perjalanan Dinas	346.303.500,00	335.516.520,00	277.756.843,00
	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	42.687.000,00	38.534.500,00	62.678.000,00
	Belanja Pemeliharaan	7.500.000,00	7.467.500,00	42.336.250,00
	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	0,00	0,00	66.206.000,00
	Belanja Transport Lokal Non PNS	392.250.000,00	388.200.000,00	51.550.000,00
2.	Jumlah Belanja Langsung (2)	2.021.258.700,00	1.975.536.371,00	1.521.623.291,00
	Jumlah 1 dan 2	8.545.135.300,00	8.477.854.387,00	8.291.268.205,00

31 Desember 2013
(Rp)

31 Desember 2012
(Rp)

2) Belanja Modal

2.090.824.500,00

1.111.763.150,00

Belanja Modal SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta Belanja Aset Tetap Lainnya dengan realisasi tahun 2013 **Rp 1.968.448.000,00** dengan rincian sebagai berikut.

No	Belanja Modal	Anggaran 2013 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2013	2012
1.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin			
	Belanja Modal Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon	300.000.000,00	269.240.000,00	0,00
	Belanja Modal Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Bus	773.079.600,00	738.920.000,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik/OHP/LCD	16.900.000,00	15.070.000,00	0,00
	Belanja Modal Billboard/Papan Nama	180.000.000,00	179.025.000,00	38.500.000,00
	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	120.285.100,00	106.915.000,00	115.148.500,00
	Belanja Modal Pengadaan Komputer Laptop	35.613.500,00	35.535.000,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Printer	45.001.000,00	26.225.000,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	154.756.950,00	146.882.000,00	287.638.900,00
	Belanja Modal Pengadaan Kamera	0,00	0,00	9.000.000,00
	Jumlah 1	1.625.636.150,00	1.517.812.000,00	450.287.400,00
2.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan dan Gedung			
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	465.188.350,00	450.636.000,00	646.485.500,00
	Jumlah 2	465.188.350,00	450.636.000,00	646.485.500,00
3.	Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan			

No	Belanja Modal	Anggaran 2013 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2013	2012
	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	0,00	0,00	14.990.250,00
	Jumlah 3	0,00	0,00	14.990.250,00
	Total Belanja Modal	2.090.824.500,00	1.968.448.000,00	1.118.765.597,64

Blitar, 3 Februari 2014

Kepala SKPD Badan PPKB Kabupaten Blitar

Drs. WAHID ROSIDI, MM
NIP. 19600721 198503 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan Cokroaminoto No. 12 Telp. (0342) 801053
BLITAR

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga puluh satu bulan Desember tahun Dua ribu tiga belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. WAHID ROSIDI, MM
NIP : 19600721 198503 1 011
Jabatan : Pengguna Anggaran

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.59 Tahun 2007, kami melakukan pemeriksaan setempat pada :

Nama : SITI NGAISAH
NIP : 19640511 198502 2 002
Jabatan : Bendahara Pengeluaran

Berdasarkan Keputusan Bupati Blitar Nomor 188/14/409.012/2013 tanggal 23 Januari 2013 ditugaskan mengurus uang, berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti – bukti yang berada dalam pengurusan itu, kami menemui kenyataan sebagai berikut :

Jumlah uang yang kami hitung dihadapan pejabat tersebut adalah :

a. Uang kertas	: Rp.	0,--
b. Uang logam	: Rp.	0,--
c. SP2D/ alat pembayaran lainnya yang belum dicairkan	: Rp.	0,--
d. Saldo Bank	: Rp.	0,--
e. Surat/barang/benda berharga yang diizinkan	: Rp.	0,--
Jumlah	: Rp.	0,--
Saldo uang menurut Buku Kas Umum Daerah, Register dan lain sebagainya berjumlah	:	
Perbedaan Positif/Negatif antar Saldo Kas dan Saldo buku	: Rp.	0,--
Penjelasan Perbedaan positif/negatif :		

Yang diperiksa,
Bendahara Pengeluaran

Blitar, 31 Desember 2013
Yang memeriksa,
Pengguna Anggaran

SITI NGAISAH
NIP. 19640511 198502 2 002

Drs. WAHID ROSIDI, MM
NIP. 19600721 198503 1 011

Foto Copy Rekening Koran



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
 Jalan Cokroaminoto No. 12 Telp. (0342) 801053
BLITAR

BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK PERSEDIAAN

Pada hari ini Sabtu tanggal Tiga puluh satu bulan Desember tahun Dua Ribu Tiga Belas, kami yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : **Drs. WAHID ROSIDI, MM**
 N I P : 19600721 198503 1 011
 Jabatan : Pengguna Anggaran

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.59 Tahun 2007, kami melakukan pemeriksaan setempat pada :

N a m a : **AGUS EFENDI, SE**
 N I P : 19830502 201103 1 009
 Jabatan : Bendahara Barang

Berdasarkan Keputusan Bupati Blitar Nomor : 188/14/409.012/KPTS/2013 tanggal 23 Januari 2013 ditugaskan mengurus barang, berdasarkan hasil pemeriksaan barang serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan itu, kami mendapatkan hasil sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan fisik persediaan pakai per 31 Desember 2013 :

No	Nama Persediaan	Nilai (Rp.)
1.	Persediaan Alat Tulis Kantor	Rp. 155.000,-
2.	Persediaan Alat Listrik	-
3.	Persediaan Material/Bahan	Rp. 1.651.086.344,-
4.	Persediaan Benda Pos	Rp. 99.000,-
5.	Persediaan Bahan Bakar	-
6.	Persediaan Bahan Makanan Pokok	
7.	Persediaan Barang Cetakan	Rp. 151.650,-
8.	Persediaan Alat Kebersihan	-
9.	Persediaan Barang Bantuan Modal	Rp. 9.000.000,-

Rincian hasil pemeriksaan fisik persediaan terlampir.

Yang diperiksa
Bendahara Barang

Blitar, 31 Desember 2013
Yang Memeriksa
Pengguna Anggaran

AGUS EFENDI, SE
Penata Muda
NIP. 19830502 201101 1 009

Drs. WAHID ROSIDI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600721 198503 1 011

Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Fisik
Persediaan Barang Habis Pakai
Per 31 Desember 2013
Daftar Persediaan Barang Habis Pakai Per 31 Desember 2013

No	Nama Barang	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5 = 3 x 4	6
	Persediaan Alat Tulis kantor				
	Persediaan Alat Tulis kantor				
	- Tinta Komputer	2	37.500	75.000	
	- Kertas HVS 70 gram	2	40.000	80.000	
	Persediaan Alat Listrik				
	Persediaan Alat-alat Listrik				
	Persediaan Material/Bahan				
	Persediaan Bibit Ternak				
	Persediaan Obat-obatan			511.899.078	
	Persediaan Bahan Kimia				
	Persediaan Bahan Pakaian Dinas				
	Persediaan Alat Kontrasepsi			1.139.187.266	
	Persediaan Benda Pos				
	Persediaan Benda Pos, Perangko dan Materai				
	Persediaan Materai				
	- Materai 6000	11	6.000	66.000	
	-Materai 3000	11	3.000	33.000	
	Persediaan Kertas Segel				
	Persediaan Amplop				
	Persediaan Bahan Bakar				
	Persediaan Bahan Bakar Minyak				
	Persediaan Bahan Bakar Gas				
	Persediaan Bahan Makanan Pokok				
	Persediaan Bahan Makanan Logistik				
	Persediaan Bahan Makanan Pasien (RSUD)				
	Persediaan Barang Cetak				
	Persediaan Karcis				
	Persediaan Buku Cetak				
	Persediaan Stiker	31	900	27.900	
	Persediaan Map	35	1.250	43.750	
	Persediaan Amplop	2	40.000	80.000	
	Persediaan Alat Kebersihan				
	Persediaan Alat Kebersihan				
	Persediaan Barang Bantuan Modal				
	Persediaan Barang Bantuan Modal Peralatan dan Mesin	3	3.000.000	9.000.000	
	Jumlah			1.660.491.994	

*) Diisi sesuai keadaan yang ada dimasing-masing SKPD/ hilangkan item yang tidak ada

Yang diperiksa,
Bendahara Barang

Blitar, 31 Desember 2013
Yang memeriksa,
Pengguna Barang

AGUS EFENDI, SE
Penata Muda

NIP. 19830502 201101 1 009

Drs. WAHID ROSIDI, MM
NIP. 19600721 198503 1 011

Lampiran Inventarisasi Aset Daerah Perolehan TA 2013

Lain-lain:

- Memo Jurnal Penyesuaian/koreksi

- Bukti Penyesuaian/koreksi

Laporan Aset Daerah Extra Komtabel